

No	ASPEK	FOKUS	NO IKK	IKK	DOKUMEN PENDUKUNG	SKPD
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Keberadaan PERDA IMB	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut	Badan Perijinan
			2	Rasio Rumah ber IMB	Daftar rincian jumlah rumah ber-IMB akumulasi s.d akhir tahun 2016 (min. Per Kecamatan)	Badan Perijinan
					Daftar rincian jumlah rumah s.d akhir tahun 2016 (min. Per Kecamatan)	Dinas PU
		3	Keberadaan PERDA RTRW	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut	BAPPEDA	
		Peraturan ttg Kependudukan	4	Pengurusan E- KTP	Daftar yang menunjukkan jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E- KTP, dan daftar yang menunjukkan jumlah penduduk per 31/12/2016 wajib ber-KTP	Dinas Dukcapil
			5	Biaya KTP	FC halaman muka, halaman yang menunjukkan besarnya biaya pengurusan KTP, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut	
		Aparat satpol PP	6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	Daftar nama Satpol PP (PNS) tahun 2016 yang ditandangani oleh pejabat berwenang	Kantor Satpol PP
					Daftar jumlah penduduk per 31/12/2016 yang ditandangani pejabat berwenang	Dinas Dukcapil
Kebijakan bidang PSK, PKL, PMKS	7	Keberadaan PERDA tentang PSK, PKL atau PMKS	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya Perda/Perbup tersebut	Bag. Hukum		
Peraturan tentang Kebersihan Ibukota Kabupaten	8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan kota	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya peraturan tersebut	DKP		
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA	Penyampaian laporan kepada pemerintah	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007	FC bukti penyerahan LPPD kepada Gubernur	Bag. Pemerintahan
			10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	FC bukti penyerahan laporan keuangan kepada BPK RI	BPKAD

	PENGEMBANGAN OTDA		11	Ketepatan waktu penyampaian Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006	FC bukti penyerahan LAKIP kepada Gubernur	Bag. Ortala
			12	Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	FC dokumen yang menunjukkan urusan wajib yang dilaksanakan pemerintah daerah dan telah diterapkan SPMnya beserta program yang dilaksanakan	Bag. Ortala
		Kerjasama antar daerah Kab/kota	13	Frekuensi Kerjasama dengan daerah lain	FC dokumen MOU dengan pemerintah daerah lain yang masih berlaku	BAPPEDA/Bag. Pemerintahan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	14	Kesesuaian prioritas pembangunan	Daftar program prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan ditandatangani oleh pejabat berwenang beserta FC daftar program prioritas nasional	BAPPEDA
			15	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	FC dokumen yang menunjukkan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan pemda	BAPPEDA
		Kewenangan	16	Waktu penetapan PERDA APBD 2016	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditetapkannya Perda tersebut	BPKAD
		Keuangan	17	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya Perda tersebut	BPKAD
			18	belanja untuk pelayanan dasar	FC laporan keuangan/CALK tahun berkenaan, baik yang audited maupun unaudited. Perda pertanggungjawaban APBD (Terkait mapping Realisasi Anggaran per urusan)	BPKAD
			19	belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan		BPKAD
		Pelayanan publik	20	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya peraturan tersebut	Bag. Hukum
		Kepegawaian	21	Rasio PNS terhadap penduduk	Daftar jumlah PNS per 31/12/2016 yang ditandatangani pejabat berwenang	BKD
			22	Keberadaan sistem informasi kepegawaian	Print out aplikasi sistem informasi kepegawaian	BKD

		Kelembagaan	23	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007	FC perda tentang SOTK sesuai dengan PP 41/2007 yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Bag. Ortala
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Produk peraturan perundangan	24	Jumlah perda tahun 2016	Daftar nomor dan tanggal perda yang diterbitkan tahun 2016 dan ditandatangani oleh pejabat berwenang	Bag. Hukum
		Raperda yang diajukan tahun berjalan	25	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda)	Daftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Sekretariat Dewan
				Jumlah Raperda yang diusulkan DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda)	Daftar Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 (baik inisiatip DPRD maupun Pemda) yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	26	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda tahun 2016	Daftar keputusan DPRD yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK	tindaklanjut keputusan KDH	27	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2016	Daftar keputusan Bupati yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Bag. Hukum
		tindaklanjut Peraturan KDH	28	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti tahun 2016	Daftar peraturan Bupati yang ditandatangani oleh pejabat berwenang	Bag. Hukum
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	29	Jumlah PERDA yang dibatalkan tahun 2016	Daftar peraturan daerah yang dikirim untuk dievaluasi oleh pemerintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Bag. Hukum
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda tentang konsultasi publik	30	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya peraturan tersebut	Bag. Hukum
		Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik	31	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website kota, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)	print out halaman depan web, leaflet/brosur, majalah, koran, surat ijin penyiaran, buletin/tabloit	Kominfo
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK, DAN	Serapan dana perimbangan	32	dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Laporan Keuangan Kabupaten setelah audit BPK RI	BPKAD
		Alokasi belanja pada APBD dari DAU	33	Belanja Publik terhadap DAU		

	BAGI HASIL	Alokasi belanja pada APBD	34	Belanja Publik terhadap total APBD		
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	35	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD		
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Lapkeu	36	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	FC pernyataan opini dari BPK atas laporan keuangan tahun 2015 & 2016	Inspektorat
		Besaran SILPA	37	SILPA thdp total pendapatan	Laporan Keuangan Kabupaten setelah audit BPK RI	BPKAD
		Realisasi belanja	38	Realisasi belanja thd anggaran belanja		
		Pengawasan Inspektorat Daerah	39	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Hasil rekonsiliasi inspektorat dan BPK RI terkait jumlah temuan BPK RI per 31/12/2016, serta berapa dari jumlah tersebut yang ditindaklanjuti tahun 2016	Inspektorat
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	40	Realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD	Realisasi PAD tahun 2016 dan Potensi PAD pada RPJMD tahun 2016	Dispenda
		Peningkatan PAD	41	Peningkatan PAD	Total PAD tahun 2015 & 2016	
13	TEROBOSAN INOVASI BARU	Penghargaan	42	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016.	Daftar penghargaan (min. Setingkat nasional) yang diterima pemerintah daerah (bkn perorangan) tahun 2016 beserta foto piala / sertifikat / piagam yang diperoleh	Bag. Humas
		Pengadaan barang dan jasa	43	Keberadaan implementasi E-procurement	FC halaman muka, halaman kedua, dan halaman yang menunjukkan ditetapkannya Perda tersebut	Kominfo
		Daya saing daerah	44	Jumlah persetujuan investasi	Daftar ijin dan realisasi investasi tahun 2016 dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang	Badan Perijinan